

Implementasi Kebijakan Publik Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Sampah bagi Aparatur Kelurahan Cikutra *Implementation of Public Program of Waste Management Education and Training for Cikutra Village Officials*

Ika Widiastuti

Universitas Krisnadwipayana

Email: iwidiastuti86@gmail.com

ABSTRAK *Pengelolaan sampah di Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul mengalami banyak permasalahan. Salah satu diantaranya adalah tidak adanya jadwal dalam pengangkutan sampah. Hal ini akan mengakibatkan penimbunan sampah. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan adanya implementasi kebijakan yaitu dengan diadakan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur Kelurahan Cikutra. Tujuan penelitian adalah untuk dapat mengetahui dan memahami konsep dan teori mengenai implementasi kebijakan publik serta konsep pendidikan dan pelatihan dalam pengelolaan sampah bagi aparatur Kelurahan Cikutra. Metode penulisan ini adalah kajian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif dan eksploratif. Dapat disimpulkan bahwa : Ada tiga unsur penting dalam proses implementasi, yaitu: (1) Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan. (2) Target group, kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut. (3) Unsur pelaksana (implementasi).*

KATA KUNCI *Implementasi, Kebijakan Publik, Pendidikan dan Pelatihan*

ABSTRACT *Managing waste in Cikutra Village, Cibeunying District. One visit there is no schedule in the transportation of waste. This will be done with landfill. To overcome this problem, implementation regulations relating to education and training for the apparatus of the Cikutra Village, Cibeunying Kidul District, Bandung City are needed. The purpose of this research is to study and understand the concepts of theories about the public and the concepts of education and training on waste management for the apparatus of the Cikutra Village, Cibeunying Kidul District, Bandung. This renewal method is a literature review with descriptive and exploratory discussions. It can be concluded that: There are three unimportant in the implementation process, namely: (1) The program or policy implemented. (2) The target group, the target community, and are expected to receive benefits from the program. (3) Implementing elements.*

KEYWORDS *Implementation, Public Policy, Education and Training*

Persoalan sampah disetiap kota besar selalu menjadi masalah tersendiri bagi pemerintah dan warganya. Begitu pula dengan Kota Bandung, meski ditunjang label *Smart City*. Produktivitas sampah di Kota Bandung mencapai sekitar 1.001.600 ton per hari, hanya 1.200 ton sampah yang bisa diangkut ke TPA. Di Kelurahan Cikutra, terdapat permasalahan di dalam pengelolaan sampah yang belum berjalan dengan baik.

Tabel 1. TPS di Kota Bandung Kecamatan Cibeunying Kidul

	Nama Lokasi	Lokasi TPS	Existing Kontainer		Sampah Masuk (m3/hari)	Sampah Keluar (m3/hari)	Peruntukan	Jadwal pengangkutan
			10	6				
1.	TPS Cikutra	Jl. Cikutra	1		25	22 atau 2 rit/hari	Umum	-
2.	TPS TD Suci	Jl. PHH. Mustofa	1		32	30 atau 3 rit	Umum/ masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Senin 3 rit • Selasa 2 rit • Rabu 3 rit • Kamis 2 rit
3.	TPS PPI/ Bak	Komplek PPI	1		1.5	6M ³ / seminggu sekali	Umum/ masyarakat	Ketika Penuh

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa di Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung dalam hal pengelolaan sampah belum efektif. Hal tersebut dapat diketahui dari jadwal pengangkutan sampah yang belum efektif. Apabila hal tersebut dibiarkan begitu saja maka dapat menimbulkan penumpukan dan penimbunan sampah.

Permasalahan persampahan di Kelurahan Cikutra bukan hanya disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk saja, selain itu juga pelayanan sarana dan prasarana lingkungan yang rendah khususnya dalam bidang pelayanan persampahan, yang mengakibatkan penanganan sampah tidak tuntas sehingga menimbulkan adanya timbunan-timbunan sampah yang tidak terangkut setiap harinya.

Melihat kondisi yang ada maka perlu adanya suatu kajian yang pasti dalam menganalisa pengelolaan sampah dan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Kota Bandung, sehingga dapat mengurangi masalah sampah yang dihasilkan dari perkembangan Kota Bandung. Masalah lain yang sering muncul dalam penanganan sampah di kawasan studi kasus adalah tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk tidak membuang sampah pada kawasan bantaran sungai. Dikarenakan semakin sulitnya ruang yang pantas untuk pembuangan sampah dan pengangkutan sampah yang kurang baik dikawasan studi sehingga masyarakat membuang sampah ke bantaran sungai.

Untuk membantu mengatasi persoalan sampah di Kota Bandung ini, Kelurahan Cikutra melaksanakan pelatihan di Kecamatan Cibeunying Kidul. Pelatihan ini merupakan kegiatan PIPPK LPM Kelurahan Cikutra tahun ajaran 2019. Pelatihan Kang PisMan (Kurangi Sampah, Pisahkan Sampah, Manfaatkan Sampah) ini merupakan program unggulan Wali Kota Bandung dan Wakil Walikota Bandung dalam rangka mengatasi pengelolaan sampah, serta diharapkan menjadi solusi persoalan sampah yang ada di Kota Bandung saat ini. Pelatihan Kang PisMan ini dimaksudkan untuk membantu menyukseskan program pemerintah Kota Bandung agar peserta dapat tersosialisasi sehingga bisa menambah wawasan dan pengetahuan serta mengerti dan memahami pentingnya Kang PisMan. Diharapkan nantinya setelah mengikuti pelatihan para peserta dapat mengimplementasikan program Kang PisMan ini di wilayah RW masing-masing, dan semoga gerakan Kang PisMan ini menjadi budaya masyarakat di Kelurahan Cikutra.

Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung memiliki penduduk yang cukup padat. Kelurahan ini sangat strategis di dalam sistem dan skema kebijakan publik terutama dalam tahap

implementasi, baik kebijakan publik yang berasal dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah, mengingat posisi kelurahan ini yang berada di tengah-tengah Kota Bandung, dengan dinamika penduduk dalam aspek sosial, ekonomi, budaya dan politik yang cukup tinggi.

Kebijakan-kebijakan pemerintah, akan sangat tergantung keberhasilannya pada tingkat *operational level of public administration*. Berdasarkan analisis situasi maka kami memilih Kelurahan Cikutra sebagai salah satu daerah yang perlu ditingkatkan kinerja aparatur publiknya dalam hal implementasi kebijakan publik, oleh karena itu kami memandang diperlukannya pendidikan dan pelatihan dalam hal pengelolaan sampah bagi aparatur Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung.

Rumusan Masalah

Bagaimanakah cara agar implementasi kebijakan publik pendidikan dan pelatihan pengelolaan sampah bagi aparatur Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung dapat berjalan dengan baik?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu untuk dapat mengetahui dan memahami konsep dan teori mengenai implementasi kebijakan publik serta konsep pendidikan dan pelatihan dalam pengelolaan sampah bagi aparatur Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung.

Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Administrasi Publik (*Public Policy Implementation*) adalah totalitas aktivitas dari kegiatan yang melakukan pelayanan publik, baik dari sudut pandang publik, sudut pandang pemerintahan (eksekutif, legislatif, maupun yudikatif), dan dari sudut pandang *stakeholders* (pihak-pihak yang terkait dengan sektor publik). Salah satu kajian dalam administrasi publik adalah studi dan praktik yang sangat erat kaitannya dengan proses kebijakan, yaitu formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan. Kebijakan publik merupakan jembatan dari hubungan konseptual antara ilmu administrasi dan ilmu politik.

Henry (1995) menjelaskan bahwa kebijakan publik berada diantara (*twilight zone*) disiplin ilmu administrasi dan ilmu politik. Selain itu administrasi publik juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam merumuskan kebijakan publik. Kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan pemerintah serta perilaku negara pada umumnya. Dalam kaitan inilah maka kebijakan mudah dipahami jika diberikan makna sebagai tindakan politik.

Tujuan dari suatu kebijakan menurut Simmons (1994) dibagi menjadi tiga hal, yaitu (1) untuk menjamin kepentingan umum secara optimal, (2) kebijakan tersebut dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku, (3) kebijakan itu didorong oleh keinginan untuk menghindari efek sosial yang destruktif. Islamy (2003) juga berpendapat tentang kebijakan publik bahwa pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam pembuatan kebijakan publik, hanya pemerintahlah yang secara sah dapat berbuat sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tersebut diupayakan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai di masyarakat. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam apa yang oleh Easton sebut sebagai *Authorities in a political system* yaitu oleh para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam masalah sehari-hari yang telah menjadi tanggung jawab.

Berdasarkan pengertian di atas Islamy (2003) mengemukakan tentang implementasi kebijakan publik sebagai berikut;

1. Kebijakan publik itu dalam bentuk penetapan tindakan pemerintah.
2. Kebijakan publik itu tidak cukup dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk nyata.
3. Kebijakan publik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud serta tujuan tertentu.
4. Kebijakan publik itu senantiasa ditunjukkan bagi kepentingan anggota masyarakat

James E. Anderson (1991) memberikan penjelasan mengenai implikasi dari pengertian kebijakan publik tersebut, antara lain;

1. Bahwa kebijakan selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
2. Bahwa kebijakan berisi tindakan atau pola pejabat pemerintah.
3. Bahwa kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah maksud akan melakukan sesuatu.
4. Bahwa kebijakan publik bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah

tertentu atau bersifat negatif, bahwa kebijakan pemerintah setidaknya dalam arti yang didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa.

Pendapat di atas menegaskan bahwa kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau bukan tindakan yang serba acak, melainkan tindakan yang direncanakan. Tindakan yang saling berkaitan dengan pola yang mengarah kepada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.

Setiap kebijakan akan selalu mengandung risiko untuk gagal, menurut Wahab (2002) hal ini disebabkan:

1. Suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, karena mungkin pihak yang terlibat tidak dapat bekerja sama, atau permasalahan yang digarap di luar jangkauan kekuasaannya, sehingga pelaksanaan kebijakan sukar untuk dilaksanakan.
2. Adanya faktor eksternal yang tidak mendukung dapat dilaksanakan kebijakan tersebut, sehingga tidak mendapatkan hasil yang optimal, atau mungkin sejak awal kebijakan tersebut kurang tepat.

Menurut Edward III (1980) terdapat empat faktor krisis atau variabel yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. 1) *communication*, 2) *resources*, 3) *disposition*, 4) *bureaucratic structure*. Dari keempat faktor tersebut mempunyai hubungan dan saling melengkapi, suatu kebijakan dalam pelaksanaan tidak akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan si pembuat kebijakan apabila didalamnya tidak ada unsur komunikasi untuk menyampaikan seluruh kebijakan baik terhadap pelaksana maupun terhadap masyarakat yang menjadi sasaran dari kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh manfaat dari suatu kebijakan. Implementasi kebijakan akan selalu berpengaruh terhadap apa yang ingin dicapai, sehingga suatu kebijakan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana akan membawa hasil yang optimal, sedangkan suatu kebijakan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana karena adanya faktor internal maupun faktor eksternal, maka tujuan yang diharapkan tidak dapat diwajibkan.

Implementasi kebijakan sendiri sesungguhnya bukan sekadar berhubungan dengan mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran birokrasi, juga menyangkut pula masalah konflik, keputusan, dan siapa memperoleh dari suatu kebijakan. Udoji (2002) dengan tegas mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan itu adalah

suatu yang penting bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan.

Lebih lanjut Nakamura dan Diane (1990) mengatakan bahwa hal-hal yang berhubungan dengan implementasi dan kebijakan adalah keberhasilan dalam mengevaluasi masalah, kemudian diterjemahkan ke dalam keputusan yang bersifat khusus. Dengan demikian implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang tidak langsung dapat memengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan yang pada akhirnya berpengaruh pada dampak, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Ada tiga unsur penting dalam proses implementasi, yaitu :

1. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan.
2. Target kelompok, kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan.
3. Unsur pelaksana (implementasi) baik organisasi maupun program yang bertanggung jawab pengelola, pelaksanaan dan pengawasan.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik benang merah bahwa implementasi kebijakan sebenarnya merupakan realisasi aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan melalui kebijakan yang telah ditetapkan sedangkan yang dimaksud dengan studi implementasi merupakan suatu upaya untuk mengukur keberhasilan atau ketidak-berhasilan suatu kebijakan.

Konsep Pendidikan dan Pelatihan

Menurut M. London (1989) dalam bukunya *Managing The Training Enterprise*, ia mengatakan bahwa "*Development refers to formal education, job experiences, relationship, and assessment of personality and abilities that help employes prepare for the future. Because it is future-oriented, it involves learning that is not necessarily related to the employe's current job.*"

Manullang (1997) dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Personalia*, mengatakan bahwa "*Latihan dan pendidikan sesungguhnya tidak sama, walaupun banyak persamaannya. Keduanya berhubungan dengan pemberian bantuan kepada pegawai, agar pegawai tersebut dapat berkembang ke tingkat kecerdasan, pengetahuan dan kemampuan yang lebih tinggi. Pendidikan sifatnya lebih teoritis daripada praktis. Latihan lebih bersifat penerapan dan keahlian. Jadi lebih bersifat praktis.*"

Pengertian Pendidikan dan Latihan lainnya dikemukakan oleh Edwin B. Flippo yang dikutip oleh Moekijat (1991) dalam bukunya *Latihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia* yaitu "Latihan berhubungan dengan menambah pengetahuan dan kecakapan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu pendidikan berhubungan dengan menambah pengetahuan umum dan pengertian tentang seluruh lingkungan kita."

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa pelatihan berhubungan dengan peningkatan kemampuan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan, sedangkan pendidikan berhubungan dengan ilmu dan pengetahuan akademik yang dimiliki oleh aparatur Kelurahan Cikutra. R.J Campbell (1991) mengatakan tentang beberapa pendekatan untuk pendidikan dan pelatihan ini, yaitu "*four approaches are used to develop employees: formal education, assessment, job experiences, and interpersonal relationship. Many companies combine these approaches.*"

Manfaat dari pendidikan dan pelatihan menurut Moekijat (1991) dalam buku *Latihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia* adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja
2. Meningkatkan prestasi kerja pegawai
3. Meningkatkan stabilitas dan fleksibilitas organisasi
4. Meningkatkan semangat kerja
5. Kesempatan pengembangan diri

Menurut Arthur (1995) pengembangan pegawai ini diperlukan oleh organisasi, sebagai mana pernyataannya "*Employees need to new skills rather than rely on a static knowledge base, this has resulted from companies' need to be more responsiveto costumers serious and product demands. The types of knowledge an employes needs have changed.*"

Kemudian Snell (1990) mengemukakan pentingnya pendidikan dan pelatihan dalam pernyataannya sebagai berikut "*A major assumption of using job experiences and the skills required for the job. To succeed in their jogs, employees must stretch their skills, aply their skills and knowledge in a new way, and master new experiences.*"

Konsep Pengelolaan Sampah

Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi. Sampah dapat mempunyai nilai negatif, sebab dalam penanganannya untuk membuang atau membersihkan memerlukan biaya yang cukup besar. Selain itu sampah

memiliki bau yang sangat menyengat, serta sampah mampu menimbulkan penyakit diare.

Pengolahan sampah adalah suatu upaya untuk mengurangi volume sampah atau merubah bentuk menjadi lebih bermanfaat, antara lain dengan cara pembakaran, pengomposan, penghancuran, pengeringan dan daur ulang. (SNI T-13-1990-F). Adapun teknik pengolahan sampah adalah sebagai berikut :

1. Pengomposan (*composting*), pengomposan adalah suatu cara pengolahan sampah organik dengan memanfaatkan aktivitas bakteri untuk mengubah sampah menjadi kompos (proses pematangan). Pengomposan dilakukan terhadap sampah organik.
2. Pembakaran sampah, pembakaran sampah dapat dilakukan pada suatu tempat, misalnya lapangan yang jauh dari segala kegiatan agar tidak mengganggu. Namun pembakaran sampah terkadang sulit dikendalikan apabila terdapat angin kencang, sebab aarang sampah, abu, debu, dan asap akan terbawa ke tempat disekitarnya yang akhirnya akan menimbulkan gangguan. Pembakaran yang paling baik dilakukan di suatu instalasi pembakaran, yaitu dengan menggunakan *incinerator*, namun pembakaran menggunakan *incinerator* memerlukan biaya yang mahal.
3. *Recycling*, merupakan salah satu teknik pengolahan sampah, dimana dilakukan pemisahan atas benda-benda bernilai ekonomi seperti kertas, plastik, karet, dan lain-lain yang kemudian diolah sehingga dapat digunakan kembali baik dalam bentuk yang sama atau berbeda dari bentuk semula.
4. *Reuse*, merupakan teknik pengolahan sampah yang hampir sama dengan *recycling*, bedanya *reuse* langsung digunakan tanpa ada pengolahan terlebih dahulu.
5. *Reduce*, adalah usaha untuk mengurangi potensi timbunan sampah, misalnya tidak menggunakan bungkus kantong plastik yang berlebihan

METODE PELAKSANAAN

Metode penelitian yang digunakan deskriptif dan eksploratif dengan melakukan kajian pustaka. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Teknik analisis data dilakukan dengan mempelajari teori-teori, peraturan-peraturan informasi yang diperoleh dari jurnal, buku teks dan makalah yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Pelaksanaan Kegiatan

Sasaran dalam kegiatan implementasi kebijakan publik (*public policy implementation*) pendidikan dan pelatihan pengelolaan sampah adalah seluruh Aparatur Kelurahan dan unsur terkait di Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung. Adapun jumlah peserta kegiatan adalah sebanyak 40 (empat puluh) orang.

Tabel 2. Peserta Kegiatan PKM

Jabatan/Unsur Peserta	Jumlah (orang)
Aparatur kelurahan	5
Ketua RW	15
LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)	3
MUI (Majelis Ulama Indonesia)	1
Karang Taruna	1
PKK terdiri dari pengurus dan Pokja	7
Petugas puskesmas	2
Tokoh masyarakat	6
Jumlah	40

Kegiatan implementasi kebijakan publik pengelolaan sampah dilaksanakan dengan bentuk pendidikan dan pelatihan melalui ceramah dan simulasi singkat seperti pada umumnya dilaksanakan, dengan waktu pelaksanaan selama 1 (satu) hari. Pendidikan dan latihan yang ditujukan dalam implementasi kebijakan publik ini termasuk dalam aktivitas pengembangan pegawai atau *employee development* salah satu alat yang sangat penting di dalam pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi. Kegiatan pendidikan dan pelatihan yang terus menerus dilakukan dapat meningkatkan prestasi kerja aparatur Kelurahan Cikutra.

Dari pernyataan di atas, terlihat adanya keterkaitan antara pendidikan dan pelatihan dengan prestasi kerja aparatur Kelurahan Cikutra, yaitu bahwa salah satu manfaat dari pendidikan dan pelatihan ini adalah peningkatan prestasi kerja aparatur Kelurahan Cikutra dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan publik.

PEMBAHASAN

Permasalahan persampahan di Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung membutuhkan evaluasi dalam pengelolaan persampahan. Kelurahan Cikutra khususnya di wilayah bantaran sungai, untuk mendukung hal tersebut maka diperlukan suatu cara pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan melalui perencanaan yang matang dan terkendali dalam bentuk pengelolaan sampah yang terpadu dengan menggunakan konsep 3R *Reduce*

ALTRUIS

(menggunakan kembali), *Reuse* (mengurangi), *Recycle* (daur ulang) serta dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam pembuangan dan pengelolaan sampah. Pembuangan dan pengelolaan sampah baik dalam pengurangan produksi sampah maupun penanganannya.

Dalam pengelolaan sampah bukan hanya dititikberatkan pada pemerintah saja, namun diperlukan kesadaran dan kemandirian dari masyarakat sehingga diharapkan dapat tercapainya suatu sistem persampahan yang baik dan tidak merusak lingkungan. Setelah pendidikan dan pelatihan maka diselenggarakan penilaian atau evaluasi oleh Tim PKM. Prosedur evaluasi pendidikan dan pelatihan terkait dengan kriteria-kriteria keberhasilan.

Evaluasi atau penilaian berfungsi untuk mengecek derajat efektivitas program, kesahihan, dan efisiensi alat pengukuran, serta efektivitas pengajaran. Penilaian (evaluasi) implementasi kebijakan publik pendidikan dan pelatihan pengelolaan sampah berkaitan dengan pada empat hal aspek penilaian, yaitu:

1. Reaksi peserta menyambut dengan baik kegiatan pelatihan ini dan mengikutinya dengan sangat antusias.
2. Pelajaran, mempelajari fakta, prinsip-prinsip dan pendekatan yang tercakup dalam latihan.
3. Tingkah laku peserta dalam pekerjaan berubah karena mengikuti pelatihan dan dapat merubah aspek psikomotorik mereka dalam kehidupan organisasi sehari-hari.
4. Hasil, peserta pelatihan dapat mereduksi biaya dalam mengimplementasikan kebijakan publik, perbaikan kinerja dalam pelayanan publik dan mampu membuat struktur birokrasi yang handal dalam melayani masyarakat.

Prinsip-prinsip evaluasi pelatihan:

1. Evaluasi telah dilakukan berdasarkan hasil pengukuran yang komprehensif, ini berarti bahwa penggunaan teknik pengukuran telah selesai.
2. Proses pemberian nilai pada peserta pelatihan implementasi kebijakan publik mengenal adanya dua macam orientasi yang dapat sejalan atau tidak sejalan. Kedua orientasi tersebut normal atau standar. Normal adalah patokan prestasi yang diperoleh dari suatu kelompok peserta pelatihan implementasi kebijakan publik tertentu. Standar adalah uraian operasional lengkap mengenai tujuan-tujuan instruksional dari suatu materi yang diharapkan dikuasai oleh peserta.
3. Kegiatan pemberian nilai telah menjadi bagian integral dari proses pembelajaran implementasi kebijakan.

4. Evaluasi telah bersifat komparabel, artinya setelah tahap pengukuran dilaksanakan dan menghasilkan angka-angka, maka prestasi yang menduduki tingkat harus memperoleh nilai yang sama pula.

Hasil evaluasi implementasi kebijakan publik (*public policy implementation*) pendidikan dan pelatihan pengelolaan sampah bagi aparatur Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung diperlukan sebagai informasi bagi pengelola program dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan untuk membuat keputusan edukatif, instruksional, diagnostik dan administratif, yang mendukung manajemen organisasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tersebut.

Implementasi kebijakan di Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung sesungguhnya bukanlah sekadar bersangkutan dengan mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, menyangkut pula masalah politik, keputusan, dan siapa memperoleh apa dari satu kebijakan.

Pelaksanaan kebijakan publik di Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung itu adalah suatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Hal-hal yang berkenaan dengan implementasi kebijakan di Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung adalah keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemahkan ke dalam keputusan yang bersifat khusus. Implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif di Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu :

1. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan di Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung.
2. Target grup, kelompok masyarakat Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan.
3. Unsur pelaksana (implementasi) baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab pengelolaan pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut di Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung.

Begitu pula dengan aspek sumber daya, baik sumber daya manusia atau sumber daya lainnya di Kelurahan Cikutra, Kecamatan

Cibeunying Kidul, Kota Bandung yang mendukung terhadap implementasi suatu kebijakan, tanpa sumber daya yang optimal kebijakan tidak akan dapat terimplementasikan secara baik, aspek struktur birokrasi di Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung menjadi penting karena secara formal semua pekerjaan yang menyangkut publik atau masyarakat harus jelas pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan mekanisme koordinasi yang secara formal harus terstruktur sehingga kebijakan dapat terimplementasikan dengan baik.

KESIMPULAN

Ada tiga unsur penting dalam proses implementasi program pengabdian ini. Pertama, adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan yang menyangkut kebutuhan masyarakat target pengabdian. Kedua, keterlibatan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut secara berkelanjutan. Ketiga, evaluasi dari pelaksanaan program pengabdian yang telah dilaksanakan.

Hasil evaluasi implementasi kebijakan publik (*Public Policy Implementation*) pendidikan dan pelatihan pengelolaan sampah bagi aparatur Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung diperlukan sebagai informasi pengelola program dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan untuk membuat keputusan edukatif, instruksional, diagnostik, dan administratif, yang mendukung manajemen organisasi penyelenggara pendidikan dan pelatihan tersebut.

Daftar Pustaka

- Tulus, M. (1995). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Anderson, J.E. (1990). *Public Policy Making*. Houghton Mifflin, Boston.
- Arthur, M.B., Claman, P.H., DeFillippi, R.J. (1995). Intelligent enterprise, intelligent careers. *Academy of Management Executive* 9 (4)
- Atmodiwiryo, S. (1993). *Manajemen training*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Campbell, R.J. (1991). *Developing human resources*. Washington DC: BNA Books.
- Nimmo, D. (2000). *Komunikasi Politik*. Alih Bahasa: Tjun Surjaman. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muhadjir, D. (2000). *Pengatur Analisis Kebijakan Publik Wiliam N. Dunn*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edward, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Hamalik, O. (2000). *Pengembangan sumber daya manusia manajemen pelatihan ketenagakerjaan pendekatan terpadu*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan, & Malayu, S.P. (2001). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Henry, N. (1995). *Administrasi Negara dan Masalah-Masalah Publik*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Islamy, I. (1997). *Prinsip-prinsip perumusan kebijakan negara*. Jakarta: Bumi Aksara

- Jones, C. (1994). *Pengatur kebijakan publik*. Dialihbahasakan oleh Ricky Ismanto. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- London, M. (1989). *Managing the training enterprise*. San Fransisco: Jossey-Bass.
- Manulang, M. (1994). *Management personalia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moekijat. (1991). *Motivasi dan Pengembangan Management*. Bandung: Alumni 1981.
- Mustopadidjadja & Tjokroamidjojo, B. (1991). *Kebijakan dan administrasi pembangunan: Perkembangan teori dan penerapan*. Jakarta: LP3ES
- Mustopadidjadja. (2003). *Manajemen proses kebijakan publik: Formulasi, implementasi dan evaluasi kinerja*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pemernitah dan Duta Pertiwi Foundation.
- Ndraha, T. (1997). *Budaya organisasi*. Jakarta : Rineka Cipta
- Newstrom, John, W. & Davis, K. (1996). *Perilaku dalam organisasi*. Diterjemahkan oleh Agus Dharma. Jakarta : Erlangga.
- Nimmo, D. (2000). *Komunikasi politik*. Alih Bahasa: Tjun Surjaman. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Notoatmodjo, S. (1998). *Pengembangan sumber daya manusia cetakan ke-2*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Nugroho, R. (2003). *Kebijakan publik: Formulasi, implementasi dan evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komutindo Gramedia.
- Pamudji, S. (1994). *Kepemimpinan pemerintah di indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Prabukusumo, Y. & Pramusinto. (1994). *Evaluasi kebijakan publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian Negara. (1996). *Panduan pendidikan dan pelatihan 1996-1997*. Jakarta: BAKN.
- Rahmat, J. (1985). *Psikologi komunikasi*. Bandung: Remaja.
- Robbins, S. P. (1994). *Organization theory*. New York: Prentice Hall.
- Tulus, M. A. (1995). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.